PERBEDAAN TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOKTANI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANI DI KABUPATEN MAROS DIFFERENCES IN GROUP PARTICIPATION LEVELS IN THE IMPLEMENTATION OF TANI CARD PROGRAMS IN MAROS DISTRIC

by Abdul Halim

Submission date: 04-Mar-2022 09:18AM (UTC+0700)
Submission ID: 1776024338
File name: rtikel-Jurnal-PALLANGGA-PRAJA,_Volume_3,_Nomor_1,_April_2021.pdf (9.83M)
Word count: 6531
Character count: 41895

PERBEDAAN TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOKTANI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANI DI KABUPATEN MAROS

DIFFERENCES IN GROUP PARTICIPATION LEVELS IN THE IMPLEMENTATION OF TANI CARD PROGRAMS IN MAROS DISTRICT

Abdul Halim[1], Amirullah[2]
[1]Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
[2]Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
[1]Email korespondensi: abdulhalim@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani berdasarkan tiga kategori kelompoktani di Kabupaten Maros. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif komparasi, dengan kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Besarnya sampel 281 kelompoktani, diambil dengan menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS for windows 23. Uji hipotesis menggunakan uji statistik *Mann-Whitney U Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros yang signifikan, antara kelompoktani yang memiliki jumlah anggota sama dengan atau kurang dari 30 orang dengan yang lebih dari 30 orang, serta antara kelompoktani yang berada pada jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) sama dengan atau kurang dari 7 km dengan yang lebih dari 7 km, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani kelas pemula dengan kelas di atasnya.

Kata kunci: kelompoktani; program kartu tani; tingkat partisipasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the level of participation of farmer groups in the implementation of the farmer card program based on three categories of farmer groups in Maros Regency. This type of research is a comparative descriptive study, with a questionnaire as the main research instrument. The sample size was 281 farmer groups, taken using proportionate stratified random sampling technique. Data analysis used SPSS for windows 23 application. Hypothesis testing used the Mann-Whitney U Test statistical test. The results showed that there was a significant difference in the level of participation of farmer groups in the implementation of the farmer card program in Maros Regency, between farmer groups that had a number of members equal to or less than 30 people with more than 30 people, and between farmer groups who were in the distance to the sub-district capital (BPP offices) are equal to or less than 7 km with those of more than 7 km, but there is no significant difference between the beginner class farmer groups and the above class.

***Key words**: farmer groups; farmer card program; participation level.*

PENDAHULUAN

Ketersediaan beras masih merupakan masalah pelik bagi bangsa Indonesia. Hal ini sangat beralasan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia yang berjumlah 271,0 juta jiwa (United Nations, 2019), memilih beras sebagai makanan pokok. Akibatnya, kebutuhan beras untuk konsumsi dalam negeri cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS (2018), konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2011 adalah 27.337.358 ton, kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 28.692.107 ton, dan selanjutnya tahun 2017 meningkat menjadi 29.133.513 ton. Di sisi lain, produksi padi (beras) nasional tidak menunjukkan

peningkatan yang signifikan, bahkan dua tahun terakhir justru mengalami penurunan 7,8%, dari produksi 59.200.534 ton GKG atau setara 33.942.865 ton beras pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 54.604.033 ton GKG atau setara 31.313.034 ton beras (BPS, 2020).

Kebijakan impor beras pernah beberapa kali ditempuh pemerintah sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penurunan produksi akibat bencana alam (banjir dan kekeringan) serta adanya serangan hama dan penyakit yang eksplosif. Hanya saja dalam pelaksanaannya, impor beras ini menimbulkan masalah yang dilematis. Hal ini terkait dengan posisi beras, selain sebagai makanan pokok, juga memiliki nilai yang strategis, baik secara politik maupun ekonomi. Di satu sisi, kelangkaan beras di pasaran, ditambah harga beras yang meningkat tajam, bisa menimbulkan gejolak sosial (keresahan masyarakat), yang pada akhirnya bisa berimbas pada gejolak politik dan gangguan keamanan yang berkepanjangan. Disisi lain, impor beras dapat menguras devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, impor beras Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 2.253.824,5 ton (BPS, 2019), membutuhkan devisa negara sebanyak US$ 1.037.128.400 atau sekitar Rp 10,37 Trilyun lebih.

Dalam upaya meningkatkan produksi beras dalam negeri, sekaligus untuk mengurangi impor, oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait termasuk Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia menempuh beberapa terobosan diantaranya adalah upaya peningkatan mutu intensifikasi, disamping upaya ekstensifikasi dan rehabilitasi lahan. Khusus upaya peningkatan mutu intensifikasi dilakukan dengan penggunaan benih unggul bermutu, aplikasi pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.

Pemupukan telah terbukti meningkatkan produksi pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan ketersediaan pangan secara umum (Stewart, Dibb, Johnson, & Smyth., 2005; Roberts, 2009), termasuk meningkatkan produksi padi yang banyak dikembangkan petani di Indonesia (Rosadi, 2015). Akibatnya, animo dan tingkat ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk sangat tinggi. Bahkan tidak jarang, petani menggunakan pupuk melebihi dosis yang direkomendasikan, terutama penggunaan pupuk urea (Yuliani, 2015).

Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan pupuk petani pada setiap musim tanam cenderung meningkat. Titik kritis permintaan pupuk petani adalah pada saat menjelang puncak musim tanam. Pada saat menjelang puncak musim tanam, jumlah permintaan pupuk cukup tinggi dan waktunya relatif hampir bersamaan (tanam serentak). Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menimbun persediaan pupuk. Akibatnya, terjadi kelangkaan pupuk di pasaran, dan kalaupun ada pupuk tersedia harganya menjadi mahal. Bahkan, bisa lebih parah lagi, ketika ada yang memanfaatkan momen kritis ini dengan melakukan penjualan pupuk palsu dengan mutu jauh dibawah standar. Kondisi ini tentunya terkait pengawasan pupuk yang belum optimal (Rachman & Tahlim, 2010), dan efeknya sangat merugikan petani beserta keluarganya.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, sekaligus untuk mengurangi beban petani dalam menebus pupuk, oleh pemerintah diadakan dan disalurkan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian (Sularno, Bambang, & Nida, 2016; Widarti, Hery, & Simpuk, 2016). Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian (Kementan, 2019). Beberapa regulasi dan kebijakan telah ditempuh

pemerintah untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, diantaranya yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; serta (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Untuk mengimplementasikan beberapa regulasi dan ketentuan diatas, oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan pihak perbankan dan stakeholder terkait lainnya termasuk Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia menggagas dan mulai menerapkan program kartu tani. Melalui program kartu tani ini diharapkan sebagai solusi alternatif dan media pengendali distribusi pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya bisa lebih terjamin dan tepat sasaran bagi petani/kelompoktani yang berhak menerima (Sriwinarti & Andres, 2016). Di Sulawesi Selatan, program kartu tani mulai diujicobakan pertama kali di Kabupaten Maros. Bahkan, Kabupaten Maros dikategorikan sebagai daerah pertama di luar Jawa yang melaksanakan program kartu tani (Ali, 2018).

Kabupaten Maros terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Hampir seluruh wilayah dataran di Kabupaten Maros bisa ditanami padi. Luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 km^2 (BPS, 2020), terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Dari 103 desa/kelurahan tersebut, ternyata 10 desa adalah daerah pesisir pantai, 5 desa merupakan kawasan lembah, 28 desa berupa lereng/bukit, dan 60 desa adalah dataran. Lahan sawah di Kabupaten Maros secara keseluruhan seluas 26.071 ha, meliputi lahan sawah irigasi seluas 15.657 ha dan lahan sawah non irigasi seluas 10.415 ha. Produksi padi sawah Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 436.730,26 ton yang dipanen dari areal seluas 58.437 ha atau rata-rata 7,22 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah tersebut, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha (BPS, 2020).

Produksi dan produktivitas padi yang cukup tinggi tersebut, tentunya ditopang oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah keberadaan kelompoktani. Keberadaan kelompoktani ini tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani yang tidak bisa diatasi secara individu (Nuryanti & Dewa, 2011), di samping untuk mempermudah pelaksanaan program pemerintah, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan program lainnya (Hanggana, 2017; Syahyuti, 2010). Di Kabupaten Maros terdapat 941 kelompoktani tanaman pangan (Kementan, 2020), yang menjadi target dan sasaran pelaksanaan program kartu tani.

Untuk mengukur tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani, salah satunya dapat diamati dari keikutsertaan anggota kelompoktani dalam tahapan kegiatan program tersebut. Contohnya, keikutsertaan anggota kelompoktani dalam pemyusunan RDKK dan pengumpulan berkas usulan untuk mendapatkan kartu tani. Berdasarkan laporan Limonu (2019) dan laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2019 (tidak dipublikasikan), diketahui bahwa dari usulan yang diajukan, telah terealisasi 14.323 anggota kelompoktani mendapatkan kartu tani, atau 41,74% dari total anggota kelompoktani di Kabupaten Maros. Ternyata, capaian realisasi penerbitan kartu tani tersebut berbeda antar kelompoktani. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut, diantaranya adalah karakteristik kelompoktani,

meliputi: (a) kelas kemampuan kelompoktani; (b) jumlah anggota kelompoktani; serta (c) jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor Balai Penyuluhan Pertanian/BPP) tempat dimana usulan petani/kelompoktani untuk mendapatkan kartu tani diproses.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi petani pada pelaksanaan program kartu tani dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu: (1) tingkat pengetahuan petani terhadap program kartu tani (Jorgi, Siwi, & Tutik, 2019); (2) kemudahan akses petani dengan ibukota kecamatan (Ardhiansyah, Suwarto, & Bekti, 2017); (3) kedudukan petani dalam kepengurusan kelompoktani (Moko, Suwarto, & Bekti, 2017); serta (4) kunjungan penyuluh pendamping dan pola pendampingan (Laleb & Bayu, 2019). Menurut Wahyuni (2003), kinerja kelompoktani dipengaruhi oleh jumlah anggota kelompok, dan jumlah anggota kelompok yang ideal adalah maksimal 30 orang petani, sedangkan Puspitaningsih, Bekti, & Arip (2016) menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi kelompoktani dalam mendukung program-program pertanian berkelanjutan antara kelompoktani kelas lanjut dengan kelompoktani kelas pemula.

Penelitian yang membahas tentang perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros khususnya berdasarkan tiga kategori kelompoktani belum banyak dikaji dan diteliti secara mendalam. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani berdasarkan tiga kategori kelompoktani meliputi kelas kemampuan kelompoktani, jumlah anggota kelompoktani, serta jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) di Kabupaten Maros.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif komparasi, dalam hal ini dilakukan analisis perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani berdasarkan tiga kategori kelompoktani di Kabupaten Maros. Populasi penelitian adalah seluruh kelompoktani tanaman pangan (padi) yang terdaftar secara resmi dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Tahun 2019 Kabupaten Maros. Jumlahnya sebanyak 941 kelompoktani (Kementan, 2020). Dalam penentuan ukuran sampel penelitian menggunakan rumus Taro Yamane, yaitu: n = , dimana n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, dan d = presisi yang ditetapkan sebesar 5% (Imran, 2017). Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh ukuran sampel penelitian adalah 281 kelompoktani.

Selanjutnya, pemilihan kelompoktani sampel penelitian dilakukan dengan teknik penarikan sampel secara *proportionate stratified random sampling*. Teknik *proportionate stratified random sampling* dapat dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Martono, 2010; Simangunsong, 2016; Filalahi, 2012). Ternyata populasi penelitian ini memiliki unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, dibedakan berdasarkan 3 (tiga) kategori, sebagai berikut: (1) kelas kemampuan kelompoktani, yaitu: (a) kelas pemula; dan (b) kelas diatas pemula, meliputi kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama; (2) jumlah anggota kelompoktani, yaitu: (a) jumlah anggota kelompoktani $\leq$ 30 orang; dan (b) jumlah anggota kelompoktani > 30 orang; serta (3) jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP), yaitu: (a) jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) $\leq$ 7 km; dan (b) jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km. Distribusi populasi dan sampel penelitian berdasarkan 3 (tiga) kategori penelitian sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Berdasarkan 3 Kategori Penelitian

No.	Kategori Kelompoktani			Populasi (kelompoktani)	Sampel (kelompok tani)
	Kelas kemampuan kelompoktani	Jumlah anggota kelompoktani (org)	Jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan/ kantor BPP (km)		
1.	Pemula	≤ 30	≤ 7	126	38
			> 7	59	18
		> 30	≤ 7	186	55
			> 7	83	25
2.	Diatas Pemula	≤ 30	≤ 7	104	31
			> 7	42	12
		> 30	≤ 7	245	73
			> 7	96	29
	Jumlah			**941**	**281**

Sumber: BPS Maros (2020), dan Kementan (2020), diolah

Instrumen utama penelitian menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada kelompoktani responden dan pengisiannya didampingi oleh penyuluh pertanian setempat. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian, yaitu tingkat partisipasi kelompoktani terhadap program kartu tani, yang meliputi beberapa tahapan kegiatan (Kementan, 2019), diantaranya adalah: (a) sosialisasi dan pengenalan program kartu tani; (b) penyusunan RDKK dibantu penyuluh pertanian selaku pendamping kelompoktani; (c) pendaftaran pembuatan kartu tani (dilengkapi berkas usulan berupa fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan; (d) penyetoran RDKK dan berkas usulan pembuatan kartu tani ke kantor BPP kecamatan (diawali entri data e-RDKK); (e) pendistribusian kartu tani; (f) penebusan pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK (tanpa kartu tani) di kios pengecer resmi; serta (g) penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di kios pengecer resmi.

Tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani diukur dari keaktifan kelompoktani mengikuti/memenuhi setiap tahapan kegiatan program kartu tani. Terkait dengan hal tersebut, untuk kepentingan analisis, telah dilakukan skoring terhadap seluruh indikator penelitian yang mengacu pada beberapa tahapan kegiatan program kartu tani tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) bila > 2/3 anggota kelompoktani dapat mengikuti/memenuhi tahapan kegiatan, diberi skor 3 berarti tingkat partisipasi tinggi; (2) bila 1/3-2/3 anggota kelompoktani dapat mengikuti/memenuhi tahapan kegiatan, diberi skor 2 berarti tingkat partisipasi sedang; dan (3) bila < 1/3 anggota kelompoktani dapat mengikuti/memenuhi tahapan kegiatan, diberi skor 1 berarti tingkat partisipasi rendah.

Dengan nilai skor tertinggi pada setiap tahapan kegiatan program kartu tani adalah 3 dan terendah 1, serta nilai total skor tertinggi yang memungkinkan untuk keseluruhan tahapan kegiatan program kartu tani adalah 21 dan nilai total skor terendah 7, serta banyaknya kelas interval (jumlah kategori) adalah 3, maka dapat ditentukan kategori tingkat partisipasi

kelompoktani dalam pelaksanaan program kartu tani, baik kategori untuk setiap tahapan kegiatan maupun kategori secara keseluruhan tahapan kegiatan. Adapun kategori untuk setiap tahapan kegiatan adalah kategori tinggi bila skor 2,34-3,00; kategori sedang bila skor 1,67-2,33; dan kategori rendah bila skor 1,00-1,66. Sementara itu, untuk keseluruhan tahapan kegiatan yaitu kategori tinggi bila total skor 17-21; kategori sedang bila total skor 12-16; dan kategori rendah bila total skor 7-11.

Data kuantitatif yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi SPSS for windows 23. Uji hipotesis menggunakan uji beda Mann-Whitney U Test. Penggunaan uji beda Mann-Whitney U Test dikarenakan sampel penelitian bersifat independen dan data penelitian menggunakan data berskala ordinal (ranking). Menurut Martono (2010), sebuah sampel dikatakan bersifat independen, apabila dua kelompok atau lebih, tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya, untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif untuk memperdalam analisis data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tiga Kategori Kelompok tani yang Dianalisis

Untuk tujuan analisis, digunakan tiga kategori kelompoktani yaitu: (a) kelas kemampuan kelompoktani; jumlah anggota kelompoktani, serta jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP). Berdasarkan kelas kemampuannya, kelompoktani responden di Kabupaten Maros didominasi kelompoktani kategori kelas pemula yaitu sebesar 48,3%, sedangkan kelompoktani kelas kemampuan diatas pemula sebesar 51,7%, terdiri atas kelas lanjut 38,9%, kelas madya 12,2%, dan kelas utama 0,6%.

Sementara itu, kategori kelompoktani berdasarkan jumlah anggota kelompoktani, ternyata kebanyakan kelompoktani responden di Kabupaten Maros memiliki jumlah anggota lebih dari 30 orang (> 30 orang). Kelompoktani dengan jumlah anggota > 30 orang adalah sebesar 64,8%. Dalam penelitian ini, kelompoktani dengan jumlah anggota > 30 orang termasuk kelompoktani dengan kategori kurang ideal. Sementara itu, kelompoktani dengan jumlah anggota ≤ 30 orang adalah sebesar 35,2%. Kelompoktani dengan jumlah anggota ≤ 30 orang termasuk kelompoktani dengan jumlah anggota ideal (Firdaus & Suharyon, 2019; Suharyon & Busyra, 2016; Wahyuni, 2003).

Selanjutnya, kategori kelompoktani responden berdasarkan jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (Kantor BPP), ternyata mayoritas kelompoktani (70,2%) berada pada lokasi dengan jarak tempuh ≤ 7 km. Dalam penelitian ini, kelompoktani dengan jarak tempuh ≤ 7 km termasuk kelompoktani dengan jarak tempuh kategori dekat. Sementara itu, kelompoktani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Kantor BPP) lebih dari 7 km sebesar 29,8%. Dalam penelitian ini, kelompoktani dengan jarak tempuh lebih dari 7 km termasuk kelompoktani dengan jarak tempuh kategori jauh.

Tingkat Partisipasi Kelompoktani pada Pelaksanaan Program Kartu Tani

Tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani dapat diamati antara lain dari partisipasi kelompoktani pada setiap tahapan kegiatan program kartu tani. Distribusi kelompoktani responden berdasarkan tingkat partisipasinya pada setiap tahapan kegiatan program kartu tani di Kabupaten Maros tertera pada Tabel 2. Pada Tabel 2 tampak bahwa berdasarkan keseluruhan tahapan kegiatan, ternyata tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros termasuk kategori sedang. Namun, bila dirinci berdasarkan tingkat partisipasi kelompoktani pada masing-

masing tahapan kegiatan, diperoleh bahwa kelompoktani menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi berturut-turut pada kegiatan yaitu: (a) penyusunan RDKK; (b) pendaftaran pembuatan kartu tani; (c) penyetoran RDKK dan kelengkapan usulan pembuatan kartu tani ke kantor BPP Kecamatan; serta (d) penebusan pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK.

Sementara itu, kelompoktani menunjukkan tingkat partisipasi sedang untuk tahapan kegiatan yaitu: (a) sosialisasi dan pengenalan program kartu tani; serta (b) pendistribusian kartu tani kepada anggota kelompoktani/petani yang berhak menerima. Kelompoktani menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah khususnya pada tahapan kegiatan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

Tabel 2. Distribusi Kelompoktani Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasinya pada Setiap Tahapan Kegiatan Program Kartu Tani di Kabupaten Maros

No	Tahapan Kegiatan	Distribusi Responden (F) per Skor (Kelompoktani)			Jumlah F_i x $Skor_i$	Skor per tahapan kegiatan	Kategori tingkat partisipasi
		1 Tingkat Partisipasi Rendah	2 Tingkat Partisipasi Sedang	3 Tingkat Partisipasi Tinggi			
1.	Sosialisasi dan pengenalan program kartu tani	56	90	135	641	2,28	Sedang
2.	Penyusunan RDKK	12	40	229	779	2,77	Tinggi
3.	Pendaftaran pembuatan kartu tani (dilengkapi fotocopy KTP, KK, dan keterangan luas lahan garapan	54	16	211	719	2,56	Tinggi
4.	Penyetoran RDKK dan kelengkapan usulan pembuatan kartu tani ke kantor BPP Kecamatan	66	14	201	697	2,48	Tinggi
5.	Pendistribusian kartu tani	163	40	78	477	1,70	Sedang
6.	Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK	0	39	242	804	2,86	Tinggi
7.	Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani	281	0	0	281	1,00	Rendah
	Total	-	-	-	4.398	15,65	Sedang

Sumber: Data Primer (2020), diolah

Tingginya tingkat partisipasi kelompoktani pada beberapa tahapan kegiatan menunjukkan besarnya penilaian dan harapan kelompoktani terhadap program kartu tani. Irawan (2011) menyatakan partisipasi petani/ kelompoktani dalam suatu kegiatan merupakan

bentuk perwujudan dari besarnya penilaian petani/kelompoktani atas keuntungan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Partisipasi diprediksi akan terus berlanjut selama petani/kelompoktani merasa puas atau diuntungkan dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Hanya saja, tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani selama ini belum bisa maksimal karena terkait dengan faktor yang berada diluar kemampuan kelompoktani. Penerbitan kartu tani misalnya, merupakan kewenangan bank pelaksana selaku operator kartu tani. Kelompoktani sebatas melengkapi berkas yang dipersyaratkan. Hal yang sama untuk penyediaan mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi. Meskipun sebagian anggota kelompoktani di Kabupaten Maros (41,74%) telah memiliki kartu tani, namun belum bisa digunakan karena mesin EDC belum tersedia di kios pengecer pupuk bersubsidi.

Untuk itulah, bisa dipahami bahwa dengan tersendatnya realisasi penerbitan kartu tani (meskipun persyaratan telah dipenuhi) dan belum disiapkannya mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi oleh bank pelaksana selaku operator kartu tani, merupakan dua faktor penyebab utama sehingga tingkat partisipasi kelompoktani pada penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani termasuk kategori rendah. Karenanya, pemerintah daerah atas persetujuan pemerintah pusat untuk sementara belum memberlakukan penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer, namun menggunakan sistem e-RDKK.

Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompoktani pada Pelaksanaan Program Kartu Tani

Hasil uji beda tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros, baik berdasarkan kelas kemampuan kelompoktani, jumlah anggota kelompoktani, serta jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP) tertera pada Tabel 3. Pada Tabel 3 tampak bahwa untuk uji beda tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani berdasarkan kelas kemampuan kelompoktani, ternyata nilai "ρ *value*" adalah 0,267, dengan taraf signifikansi 95% (α=0,05). Ini berarti "ρ *value*" > 0,05 (non signifikan). Dari hasil uji ini dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani kelas pemula dengan kelompoktani kelas diatas pemula dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros.

Tabel 3. Hasil Uji Beda Tingkat Partisipasi Kelompoktani pada Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Maros Berdasarkan 3 Kategori Penelitian

No.	Kategori Kelompoktani	Hasil Uji Beda		
		N	Mann-Whitney U	Asymp.Sig (2-tailed)
1.	Kelompoktani kelas pemula	136	9120	0,267
	Kelompoktani kelas diatas pemula	145		
2.	Kelompoktani dengan jumlah anggota ≤ 30 orang	99	5046	0,00
	Kelompoktani dengan jumlah anggota > 30 orang	182		

3.	Kelompoktani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) ≤ 7 km	197	2774,50	0,00
	Kelompoktani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km	84		

Sumber: Data Primer (2020), diolah

turut berikut ini.

Analisis Perbedaan Tingkat Partisipasi Kelompoktani pada Pelaksanaan Program Kartu Tani Berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompoktani

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney U Test pada Tabel 3, diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani kelas pemula dengan kelompoktani kelas diatas pemula dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros. Hasil ini menandakan bahwa baik kelompoktani kelas pemula maupun kelompoktani kelas diatas pemula, keduanya menunjukkan kinerja yang tidak berbeda secara signifikan dalam hal keikutsertaan, keaktifan dan keterlibatan berpartisipasi pada pelaksanaan program kartu tani.

Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan falsafah dan tujuan penilaian kelas kemampuan kelompoktani yang dilakukan setiap tahun. Menurut Sukino (2014) dan Margolang (2018), terdapat beberapa kriteria untuk penilaian kelas kemampuan kelompoktani, diantaranya adalah kemampuan meningkatkan hubungan melembaga antara kelompoktani dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Tentunya, kriteria penilaian ini tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kelompoktani ini. Hal ini logis mengingat lembaga KUD sudah beralih fungsi, dan umumnya tidak lagi berorientasi untuk membantu petani/kelompoktani. Dengan adanya kriteria ini, penilaian kelas kemampuan terhadap salah satu kelompoktani

Sementara itu, untuk uji beda tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani berdasarkan jumlah anggota kelompoktani (Tabel 3), ternyata nilai "ρ *value*" adalah 0,00, dengan taraf signifikansi 95% (α=0,05). Ini berarti "ρ *value*" < 0,05 (signifikan). Dari hasil uji ini dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros antara kelompoktani yang memiliki jumlah anggota ≤ 30 orang dengan kelompoktani yang memiliki jumlah anggota > 30 orang.

Selanjutnya, untuk uji beda tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program Kartu Tani berdasarkan jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan/kantor BPP (Tabel 3), ternyata nilai "ρ *value*" adalah 0,00, dengan taraf signifikansi 95% (α=0,05). Ini berarti "ρ *value*" < 0,05 (signifikan). Dari hasil uji ini dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros antara kelompoktani yang berada pada jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) ≤ 7 km dengan kelompoktani yang berada pada jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km.

Analisis lebih jauh terkait perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros, baik berdasarkan kelas kemampuan kelompoktani, jumlah anggota kelompoktani, maupun jarak tempuh kelompoktani ke ibukota kecamatan (kantor BPP), diuraikan berturut-

bisa menjadi bias dan tidak valid. Akibatnya, sangat mungkin terjadi, ada kelompoktani yang ditetapkan memiliki kelas kemampuan diatas kelas pemula (misalnya kelas lanjut, kelas madya, atau kelas utama), akan tetapi dalam kenyataannya kinerja kelompoktani tersebut tidak berbeda dengan kelompoktani yang ada dibawahnya yaitu kelompoktani kelas pemula.

Disamping faktor tersebut diatas, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompoktani yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila terdapat 48% kelompoktani di Kabupaten Maros, yang resmi terbentuk lebih dari 10 tahun lalu, namun faktanya sampai sekarang sebagian besar masih tercatat sebagai kelompoktani kelas pemula. Padahal, menurut Permentan Nomor67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, pada bagian lampiran dijelaskan bahwa penilaian kelas kemampuan kelompoktani seharusnya dilaksanakan setiap tahun oleh penyuluh pertanian, dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompoktani yang bersangkutan. Pembinaan dan penilaian tersebut, tujuannya tidak lain adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan kelompoktani dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi kelompoktani, baik sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, maupun sebagai unit produksi.

Pembinaan dan penilaian kelompoktani yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya menyebabkan kinerja kelompoktani tidak menggambarkan kelas kemampuan kelompoktani secara utuh. Malah, menurut Wahyuni (2003), kelompoktani yang sudah mencapai kelas kemampuan tingkat madya dan berusia tua dinilai sudah tidak dinamis, dan mengarah pada kelompoktani yang tidak efektif. Jadi, wajar saja jika hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani kelas pemula dengan kelompoktani kelas diatas pemula pada tingkat partisipasi kelompoktani terhadap program kartu tani di Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitaningsih, Bekti & Arip (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompoktani kelas lanjut dengan kelompoktani kelas pemula pada tingkat partisipasi kelompoktani mendukung program-program pertanian berkelanjutan di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Terkait hal ini diperlukan pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompoktani secara berkelanjutan sehingga kelompoktani dapat terus meningkat kinerjanya sesuai jenjang kelas kemampuan yang dimiliki.

Analisis Perbedaan Tingkat Partisipasi Kelompoktani pada Pelaksanaan Program Kartu Tani Berdasarkan Jumlah Anggota Kelompoktani

Hasil uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney U Test pada Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani yang memiliki jumlah anggota $\leq$ 30 orang dengan kelompoktani yang memiliki jumlah anggota > 30 orang dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros. Berdasarkan Permentan RI Nomor: 67/Permentan/ SM.050/12/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, pada bagian lampiran dijelaskan bahwa kelompoktani merupakan kelembagaan petani non-formal yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota antara 20-30 petani, atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dalam satu hamparan lahan usahatani.

Keberadaan kelompoktani yang beranggotakan 20-30 petani dalam satu

hamparan lahan usahatani memiliki kelebihan dan kelemahan (Hanggana, 2017). Kelebihannya antara lain adalah dengan hamparan usahatani yang berdekatan maka kegiatan massal terkait kegiatan budidaya akan relatif mudah dilakukan. Anggota kelompoktani yang memiliki persamaan kebutuhan akan air dan keamanan dari organisme pengganggu tanaman menjadikan mereka akan mudah diajak melakukan kegiatan massal, misalnya penerapan sistem tanam serentak, gotong royong membersihkan saluran irigasi, gropyokan tikus, dan beberapa kegiatan massal lainnya.

Namun, keberadaan kelompoktani yang beranggotakan 20-30 petani dalam satu hamparan juga memiliki kelemahan. Kelemahannya antara lain adalah anggota kelompoktani tersebut bisa saja berdomisili ditempat yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Dengan domisili yang relatif berjauhan, anggota kelompoktani tersebut kemungkinan tidak saling mengenal mengenai potensi sumber daya anggota kelompoktani yang lain. Kondisi demikian menimbulkan kesulitan bagi pengurus kelompoktani untuk me-*manage* seluruh anggota kelompoktani. Pertemuan kelompoktani hanya efektif dilaksanakan di sekitar lahan usahatani. Meskipun pertemuan di sekitar lahan usahatani ini sebenarnya bukan suatu masalah jika hal yang dibahas terkait dengan teknis usahatani, bahkan mungkin saja lebih efektif. Namun, akan berbeda bila hal yang dibahas terkait dengan aspek manajemen dan kepemimpinan kelompoktani, tentunya hal ini bisa menimbulkan masalah. Masalah yang timbul akan semakin nyata bila kelompoktani beranggotakan jauh melebihi 30 orang.

Kelompoktani yang beranggotakan jauh melebihi 30 orang dalam satu hamparan, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi pengurus kelompoktani ketika ada tahapan kegiatan/program yang membutuhkan keikutsertaan, keterlibatan, dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompoktani sebagaimana program kartu tani di Kabupaten Maros (Tabel 2). Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kelompoktani dengan jumlah anggota > 30 orang tersebut, menjadikan kinerja yang dihasilkan akan berbeda bila dibandingkan dengan kelompoktani yang memiliki jumlah anggota ≤ 30 orang. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani yang memiliki jumlah anggota 30 orang dengan kelompoktani yang memiliki jumlah anggota/orang dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Firdaus & Suharyono (2019), Suharyon & Busyra (2016) serta Wahyuni (2003) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja kelompoktani diantaranya adalah jumlah anggota kelompoktani, dalam hal ini jumlah anggota kelompoktani yang ideal adalah maksimal 30 orang. Khusus kelompoktani dalam satu hamparan dengan jumlah anggota yang relatif besar (jauh melebihi 30 orang), perlu ditempuh upaya pemekaran kelompoktani menjadi 2-3 kelompoktani. Melalui pemekaran kelompoktani ini, diharapkan permasalahan yang dihadapi kelompoktani dapat teratasi.

Analisis Perbedaan Tingkat Partisipasi Kelompoktani pada Pelaksanaan Program Kartu Tani Berdasarkan Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan (Kantor BPP)

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney U Test pada Tabel 3, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani yang memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km dengan kelompoktani yang memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) ≤ 7 km dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros. Adanya perbedaan hasil yang signifikan tersebut dapat disebabkan

oleh beberapa hal diantaranya adalah faktor kemudahan mengakses informasi, komunikasi, dan transportasi.

Kelompoktani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) ≤ 7 km (kategori dekat), akan lebih mudah dalam mengakses informasi, komunikasi, dan transportasi dibanding kelompoktani dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km (kategori jauh). Kelompoktani dengan jarak yang dekat dari akses informasi, komunikasi, dan transportasi memiliki peluang yang lebih baik untuk menggali informasi, mengkonsultasikan permasalahan, dan mendiskusikan hal-hal baru yang ditemui, yang pada akhirnya menjadikan kelompoktani tersebut bisa lebih aktif berpartisipasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana halnya program kartu tani di Kabupaten Maros.

Fenomena ini berbeda halnya untuk kelompoktani dengan jarak tempuh yang jauh dari akses informasi, komunikasi, dan transportasi. Kelompoktani yang jauh dari akses informasi, komunikasi, dan transportasi cenderung lebih pasif dikarenakan akses yang jauh dari ibukota kecamatan (kantor BPP). Di sisi lain, penyuluh pertanian selaku pendamping kelompoktani yang berkedudukan di kantor BPP Kecamatan, juga membutuhkan sumber daya yang lebih besar ketika hendak melakukan pembinaan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kelompoktani yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya, kelompoktani yang berada jauh dari kantor BPP Kecamatan, cenderung kurang aktif berpartisipasi pada setiap tahapan program/ kegiatan yang dilaksanakan, termasuk program kartu tani di Kabupaten Maros.

Oleh karena itu, bisa dipahami jika hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani yang memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) > 7 km dengan kelompoktani yang memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) ≤ 7 km dalam hal tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Moko, Suwarto, & Bekti (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi petani yang signifikan terhadap program kartu tani di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen berdasarkan lingkungan petani antara petani yang jarak aksesnya jauh dari Kantor Kecamatan dan Bank BRI dengan petani yang jarak aksesnya dekat Kantor Kecamatan dan Bank BRI.

Selanjutnya, hasil penelitian Ardhiansyah, Suwarto, & Bekti (2018) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap petani yang signifikan terhadap program kartu tani di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali berdasarkan lingkungan petani. Sikap petani yang jarak sumber informasi dekat dari Kantor Kecamatan, BPP, dan Bank BRI lebih baik dari sikap petani yang jarak sumber informasi jauh dari Kantor Kecamatan, BPP, dan Bank BRI.

Kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi kesenjangan akses tersebut antara lain adalah kelompoktani yang relatif jauh dari ibukota kecamatan (Kantor BPP) perlu dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stake holder terkait lainnya, sehingga dapat meringankan beban mereka terutama dalam hal kemudahan mendapatkan akses informasi, komunikasi dan transportasi. Di sisi lain, penyuluh pertanian selaku pendamping dan pembina kelompoktani, perlu diberikan tambahan fasilitas dan insentif agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal sehingga penguatan kelompoktani dapat tercapai (Hermanto dan Dewa, 2011). Diharapkan adanya bantuan dan fasilitasi ini partisipasi kelompoktani terhadap program kartu tani di Kabupaten Maros bisa meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.

SIMPULAN

Terdapat perbedaan tingkat partisipasi kelompoktani dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Maros yang signifikan, antara kelompoktani yang memiliki jumlah anggota sama dengan atau kurang dari 30 orang dengan yang lebih dari 30 orang, serta antara kelompoktani yang berada pada jarak tempuh ke ibukota kecamatan (kantor BPP) sama dengan atau kurang dari 7 km dengan yang lebih dari 7 km, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompoktani kelas pemula dengan kelas diatasnya. Untuk itu, kelompoktani yang relatif jauh (> 7 km) dari ibukota kecamatan (kantor BPP) perlu diberikan bantuan, dan fasilitas terkait akses informasi, komunikasi, dan transportasi, serta adanya pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompoktani secara berkelanjutan, termasuk upaya pemekaran menjadi 2-3 kelompoktani apabila jumlah anggota relatif besar (jauh melebihi 30 orang), dengan demikian diharapkan tingkat partisipasi kelompoktani pada pelaksanaan program kartu tani bisa meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. F. (2018, November 7). BRI Sosialisasikan Kartu Tani, Maros Jadi Kabupaten Pertama di Luar Jawa. *Tribun Timur*, edisi online. Retrieved from https://makassar. tribunnews.com/2018/11/07/bri-sosialisasikan-kartu-tani-maros -jadi-kabupaten-pertama-di-luar-jawa

Ardhiansyah, M. H., Suwarto, S., & Bekti, W. U. (2018). Perbedaan sikap petani terhadap program kartu tani di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. *Agromedia*, 36(2), 92-98.

BPS. (2020). Statistik Indonesia 2020 'Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan'. Jakarta. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2020/02/28/6e654dd717552e82fb3c2ffe/statistik-indonesia-penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html

BPS. (2019). Statistik Indonesia 2019. Jakarta. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html

BPS. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta. Retrieved from https://www.bps.go.id/ publication /2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/ statistik-indonesia-2018.html

BPS Maros. (2020). Kabupaten Maros Dalam Angka 2020. Maros. Retrieved from https://maroskab.bps.go.id/publication/2020/04/27/15ac0013c6b6841152f00952/kabupaten-maros- dalam-angka-2020.html

Firdaus, F., & Suharyon, S. (2019). Kinerja Kelompoktani Dalam Sistem Usahatani Padi Lahan Rawa dan Metode Pemberdayaannya: Studi Kasus Pada Kegiatan Padi Sawah Di Lahan Sub Optimal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi (JIITUJ)*, *3*(2), 162-169.

Hanggana, S. (2017). Analisis kelemahan regulasi poktan, gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam peningkatan pendapatan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian,* 15(2), 137-149.

Hermanto, & Dewa, K. S. S. (2011). Penguatan kelompoktani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian,* 9(4), 371-390.

Imran, H. A. (2017). Peran sampling dan distribusi data dalam penelitian komunikasi pendekatan kuantitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(1), 111-126.

Irawan, E. (2011). Prospek partisipasi petani dalam program pembangunan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim di Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1), 67-76.

Jorgi, R. S., Siwi, G., & Tutik, D. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Semarang. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2), 88-98.

Kementan. (2020). Rekap Kelompoktani Per Wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros 2020. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Jakarta, Kementerian Pertanian.

Kementan. (2019). Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. Jakarta, Kementerian Pertanian. Retrieved from http://psp1.pertanian.go.id/assets/file/2019/Pedoman_Teknis_Penyediaa an_dan_ Penyaluran_Pupuk_Bersubsidi_Tahun_2019.pdf

Kementan. (2019). Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. Jakarta, Kementerian Pertanian. Retrieved form http://psp1.pertanian.go.id/assets/file/2019/Pedoman_teknis_ Verifikasi_dan_Validasi_Penyaluran_Pupuk_Bersubsidi_Tahun_2019.pdf

Laleb, A. M. M., & Bayu, N. (2019). Hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan keputusan inovasi penggunaan kartu tani di Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga. *AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian,* 7(2), 154-158.

Limonu, N. (2019, Mei 20). Tahap Awal, BRI Maros Terbitkan 6.200 Kartu Tani. *Sindonews.com.* Retrieved from https://makassar.sindonews.com/berita/26114/4/tahap-awal-bri-maros-terbitkan-6200-kartu-tani

Margolang, N. (2018). Strategi peningkatan kelas kemampuan kelompoktani. *Jurnal Agro Riau,* 1(3), 1-18.

Martono, N. (2010). Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS. Yogyakarta: Gava Media.

Moko, K. W., Suwarto, S., & Bekti, W. U. (2017). Perbedaan persepsi petani terhadap program kartu tani di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 32(1), 9-13.

Nuryanti, S., & Dewa, K. S. S. (2011). Peran kelompoktani dalam penerapan teknologi pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 29(2), 115-128.

Puspitaningsih, O. S., Bekti, W.U., & Arip, W. (2016). Partisipasi kelompoktani dalam mendukung program-program pertanian berkelanjutan di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture,* 31(2), 79-85.

Rachman, B., & Tahlim, S. (2010). Impacts and future perspectives of fertilizer policy in Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian,* 8(3), 193-205.

Roberts, T. L. (2009). The role of fertilizer in growing the world's food. *Better Crops,* 93(2), 12-15.

Rosadi, A. H. Y. (2015). Kebijakan pemupukan berimbang untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. *Jurnal Pangan*, 24(1), 1-14.

Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: CV. Alfabeta.

Sriwinarti, N. K., & Andres, F. (2016). Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi. Prosiding SENTIA, Politeknik Negeri Malang, 8, A191-195. Retrieved from http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA 2016/article/download/39/34

Stewart, W. M., Dibb, D.W., Johnson, A. E., & Smyth, T. J. (2005). The Contribution of commercial fertilizer nutrients of food

production. *Agronomy Journal,* 97(1), 1-6.

Suharyon, S., & Busyra, B. S. (2016). Kinerja Kelompoktani dalam Sistem Usahatani Padi Lahan Sub Optimal dan Metode Pemberdayaannya (Studi Kasus pada Kegiatan Padi Sawah di Lahan Sub Optimal. ***Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora***, 18(1), 78-85.

Sukino. (2014). Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Petani: Terobosan Menanggulangi Kemiskinan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sularno, S., Bambang, I., & Nida, H. (2016). Analisis pelaksanaan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, 1(2), 73-87.

Syahyuti. (2010). Lembaga dan organisasi petani dalam pengaruh negara dan pasar. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 28(1), 35-53.

United Nations. (2019). World Population Prospects 2019. *United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.* Retrieved from https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Wahyuni, S. (2003). Kinerja kelompoktani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal Litbang Pertanian,* 22(1), 1-8.

Widarti, S., Hery, M. K., & Simpuk, S. (2016). Analisis pemasaran pupuk bersubsidi Tanaman Pangan di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Agrosains,* 13(2), 9-13.

Yuliani, F. (2015). Efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi pada tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Spirit Publik*, 10(1), 133-162.

PERBEDAAN TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOKTANI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANI DI KABUPATEN MAROS DIFFERENCES IN GROUP PARTICIPATION LEVELS IN THE IMPLEMENTATION OF TANI CARD PROGRAMS IN MAROS DISTRIC

ORIGINALITY REPORT

25%	24%	9%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	5%
2	jurnal.uns.ac.id Internet Source	3%
3	iskandarppl.wordpress.com Internet Source	1%
4	journal.umy.ac.id Internet Source	1%
5	Dedik Fitra Suhermanto, Mochamad Aan Sugiharto, Syasya Yuania Fadila Mas'udi. "Training and assistance in making village profiles as a branding facility for Pujon Kidul tourism village", Community Empowerment, 2021 Publication	1%
6	palembang.bpk.go.id Internet Source	

		1 %
7	jurnalkampus.stipfarming.ac.id Internet Source	1 %
8	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	1 %
9	www.slideshare.net Internet Source	1 %
10	docobook.com Internet Source	1 %
11	repository.pertanian.go.id Internet Source	1 %
12	jurnal.poltekkes-solo.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	alandta.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %

18	cybex.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
19	1library.net Internet Source	<1 %
20	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
22	www.scilit.net Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
24	Bayu Mahendra, Suprapto Suprapto, Hima Barima. "PENGARUH PROGRAM KARTU TANI TERHADAP PENURUNAN BIAYA PUPUK PADA PETANI PADI", Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2021 Publication	<1 %
25	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
27	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

28	Eny Maryanti, Wildah Nihayatul Fithri. "Corporate Social Responsibilty, Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan", Journal of Accounting Science, 2017 Publication	<1 %
29	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
30	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %
32	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
33	Yonette Maya Tupamahu. "Kinerja sektor pertanian dan non pertanian dalam perekonomian wilayah di Propinsi Maluku Utara", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2014 Publication	<1 %
34	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
35	jt.ft.ung.ac.id Internet Source	<1 %
	doaj.org	

36	Internet Source	<1 %
37	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
38	psp.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
39	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
40	www.docdroid.net Internet Source	<1 %
41	anzdoc.com Internet Source	<1 %
42	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
43	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
44	journal.unusa.ac.id Internet Source	<1 %
45	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
46	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
47	media.neliti.com Internet Source	<1 %

48	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
49	biroinfrasda.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
50	doku.pub Internet Source	<1 %
51	es.scribd.com Internet Source	<1 %
52	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
53	Indah Listiana, Abdul Mutolib, Rinaldi Bursan, Helvi Yanfika, Raden Ajeng Diana Widyastuti, Ali Rahmat. "Institutional strengthening of farmer group to support sustainable agriculture and food security in Pesawaran regency", Journal of Physics: Conference Series, 2021 Publication	<1 %
54	Dini Khoirun Nadia, Jojok Dwiridotjahjono. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010 – 2019", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2021 Publication	<1 %

55	jurnal.fp.uns.ac.id Internet Source	<1 %
56	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

PERBEDAAN TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOKTANI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANI DI KABUPATEN MAROS DIFFERENCES IN GROUP PARTICIPATION LEVELS IN THE IMPLEMENTATION OF TANI CARD PROGRAMS IN MAROS DISTRIC

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15